

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azizah, F.N., Billy Nugraha, 2021, *Pengantar Statistika Industri: Pengenalan Teori Dasar Probabilitas*, Jejak Pustaka, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief (II), 2008, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Bernand L., Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangka Education, Yogyakarta,
- Hutagalung Sukanti, Arie, Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang .
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Mngenai Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Perlindungan, A.P,1998, *Komentat Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta..

- Pramono, Gatot Eddy, 2022, *Pemolisian Humanis Transformasi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Pt.Gramedia, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Usana Offset Printing, Surabaya.
- Sampara, Said, Agist, Abdul, Muryani Sufran, Basyuni, Fuziah, Hasanuddin Nurjannah, Handa, Darwana, Kadir Hasan, Nurjaya, Kanenu, Hasanuddin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta .
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN, Jakarta.
- Soetandjo Wignjosebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Arifin, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung,
- Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria di Indonesia; Konsep Dasar dan Implementasi*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

#### **Jurnal:**

- Andi Bustamin, “Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional”, *Inspirasi*, Vol. 10, No. X, Juli 2010.
- Anshar, Ryanto Ulil, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2020.
- Alfons, Mujiati, “Masalah Delik Pidana Pertanahan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019.
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No.2, Desember 2020
- D.K., Andi Bustamin, “Kedudukan Hak menguasai Negara Atas Tanah”, *Fiat Justitiam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Januari-April 2012.

- Ida Nurlinda, “Perolehan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturan, *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No.2, Desember 2018.
- Jaminuddin Marbun, Ginting, Raja Kenasihen, dkk, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No.2, Juli 2021
- Lailan S.H., “Analisis Dampak Konversi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15, No. 1, Juli 2015.
- Laurensius Arliman, “Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial”, *Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni 2019,
- Lutfhi, Ahmad Nashih, “Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla”, *Bhumi; Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4, No. 2, November 2018.
- Mustafa’, Afifi Ab.Halim, Amni, Shabrina Zata, Maulana Mufti, “Legal System In Perspective H.L.A. Hart and Lawrence M. Friedman”, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 1, June 2023
- Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005/ Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No. 02, Juni 2016.
- Sahnan, dan Zainal Asikin, “Penegakan Hukum Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan di Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 1, April 2018.
- Satria Sukananda, “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vo.2, No 3, November 2021.
- Sukmariningsih, Retno M, “Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol.26, No.2, Juni 2014
- T.N. Chayadi, “Efektivitas Banan Hukum di Pengadilan”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.2, No.1, April 2013 .
- Widowati, Ayu Dyah, Yurista, Ananda Prima, Bosko, Rafael Edy, “Hak Pengusahaan atas Sumber Daya Alam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *JLegislasi Indonesia*, Vol. 16, No.2, Juni 2019.

## Internet

Apriadi Gunawan, 2023, “Sekjen AMAN: Sahkan RUU Masyarakat Adat, Masa Depan Dunia Ditentukan Masyarakat Adat”, Diakses melalui <https://www.aman.or.id/news/read/sekjen-aman-sahkan-ruu-masyarakat-adat-masa-depan-dunia-ditentukan-masyarakat-adat>, Tanggal 24 Januari 2024.

Bakumsu, 2022, “Konflik Panjang PT TPL Dengan Masyarakat Adat Natumingka”, diakses melalui <https://bakumsu.or.id/konflik-panjang-pt-tpl-dengan-masyarakat-adatnatumingka/>, Tanggal 30 November 2022.

CNN Indonesia, 2020, “Bentrok dengan PTPN II Terkait HGU Warga Langkat Dipukuli”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929202118-20-552440/bentrok-dengan-ptpn-ii-terkait-hgu-warga-langkat-dipukuli>, Tanggal 30 November 2022.

Food And Agriculture Organization, 2002, “Land Tenure and Rural Development”, diakses melalui <https://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm#bm05.1>, Tanggal 1 Desember 2022,

Jabbar, 2018, “Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh”, diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr), Tanggal 17 Juli 2023

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Artikel, diakses pada [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Pada tanggal 20 Agustus 2022.

Karokaro, Ayat S, 2021, “Mempertahankan Lahan Dari PT TPL, Belasan Warga Adat Natumingka Luka-Luka”, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adatnatumingka-luka-luka/>, Pada tanggal 12 November 2022.

Mifta Hadi, 2016, “Peran POLRI dalam Penanganan Konflik Agraria di Sektor Perkebunan”, diakses melalui [http://library.stikptik.ac.id/file?file=digital/5470\\_8-JIK085-16-024.pdf](http://library.stikptik.ac.id/file?file=digital/5470_8-JIK085-16-024.pdf), Tanggal 22, November 2022.

Muliyawan, 2021, “Paradigma Hukum progresif”, diakses melalui <https://www.pn-palopo.go.id/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, Pada Tanggal 20 Agustus 2022.

Muhammad Mahrus, 2020, “Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi&Prospeknya)”, diakses melalui <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnalonline/PENGATURAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20SUBJEK%20TINDAK%20PIDANA.pdf>, pada tanggal 12 Juli 2022.

Realitasonline, 2021, “PT SSL Diduga Rusak Ratusan Hektar Kebu Warga di PALAS”, diakses melalui <https://realitasonline.id/sumut/pt-ssl-diduga-rusak-ratusan-hektar-kebun-warga-di-palas/>, Tanggal 30 November 2022.

Sihubuan, 2021, “Komisaris SSL: Lebih 26 Ribu Hektare Lahannya Dikuasai Pihak Lain”, diakses di <https://analisadaily.com/berita/baca/2021/11/21/1024525/komisaris-ssl-lebih-26-ribu-hektare-lahannya-dikuasai-pihak-lain/>, Tanggal 18 Mei 2022.

Tata Usaha Kejaksaan RI, 2010, “Criminal Justice System Di Negara Hukum Indonesia”, diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unitkejaksaan.php?id\\_u=28&idsu=39&idke=0&hal=1&id=1661&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unitkejaksaan.php?id_u=28&idsu=39&idke=0&hal=1&id=1661&bc=), Pada Tanggal 17 Agustus 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Kuasanya

Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Denda Administratif dari Bajak Di Bidang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-62/Men.LHK/Sekjen/Kum.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Mengenai Tata Ruang Tentang Izin Atau Hak Atas Tanah  
TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Putusan Nomor 328/Pid.B/2013/PN.PSP

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak

## **LAIN-LAIN**

### **Penelitian**

Irmansyah Nasution, 2018, “Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Di atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Di Ditreskrimum Polda Sumut)”, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Petrus, Mardana, 2011, “Implementasi Supremasi Hukum Guna mengoptimalkan Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”, *Kertas Karya Perorangan (TASKAP)*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

### **Laporan-Laporan**

AMAN, Catatan Akhir Tahun 2021

Jikalahari, 2021, *Konflik Ilegal PT TPL di Kawasan Danau Toba (Temuan Investigasi, Bukan Saja Kerap Melakukan Kekerasan, Ternyata Izin PT. Toba Pulp Lestari Ilegal)*

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020, *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria Pandemi Covid 19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar.*

KLHK, *Siaran PERS Pemerintah Dorong Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Untuk Reforma Agraria*, diakses melalui [ppid.menlhk.go.id siaran.pers](http://ppid.menlhk.go.id/siaran.pers),

MENLHK, 2024, diakses melalui [https://kukuh.menlhk.go.id/kawasan\\_hutan](https://kukuh.menlhk.go.id/kawasan_hutan),

WALHI, 2018, *Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 (Bagaimana Masa Depan Keadilan Ekologis 2018)*

World Bank, 2000, *World Development Report 2000/2001 Attacking Poverty*